

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Secara umum, pelaksanaan manajemen Pelayanan Informasi Publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berjalan kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini beberapa kendala yang cukup signifikan terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik. Dari fungsi perencanaan, pelayanan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah belum memiliki rencana jangka panjang atau rencana strategis, padahal perencanaan strategis perlu dilakukan untuk keberlangsungan pelayanan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar dapat mengantisipasi situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan pemikiran untuk meninjau kembali prioritas yang mungkin tidak penting lagi. Selanjutnya adalah daftar informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang belum bisa disosialisasikan kepada publik karena menunggu Surat Keputusan (SK) Pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan kenyataan di atas maka kebutuhan akan SK Pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengenai pengesahan daftar klasifikasi informasi publik menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pelayanan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Prinsip mengenai transparansi dan

pemerintahan yang terbuka demi tata kelola pemerintahan yang baik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjadi dasar dari kebutuhan tersebut. Karena dengan adanya SK tersebut, pelayanan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih maksimal tanpa ada keragu-raguan dalam memberikan informasi yang memang berhak diketahui oleh publik.

Dari fungsi pengorganisasian, berlakunya UU KIP, membuat perubahan terhadap cara masing-masing unit kerja merekam (*capture*) hasil kinerjanya agar menjadi lebih terbuka kepada publik. Masing-masing unit kerja akan lebih berhati-hati, dan ini yang membuat sulitnya Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam mengakuisisi informasi, terutama informasi publik yang ada sebelum tahun 2010. Hal ini yang juga menunjukkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah belum siap dengan keterbukaan terhadap informasi publiknya.

Kebutuhan akan adanya kepala bagian yang khusus menangani pelayanan informasi publik akan menjadi rencana selanjutnya dalam melengkapi komposisi struktur organisasi Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan tanpa adanya campur tangan pekerjaan kehumasan.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pelayanan informasi publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, antara lain:
 - a. Keterbatasan Personil/SDM Yang Khusus Menangani Penyediaan dan Pelayanan Informasi. Salah satu kendala yang cukup mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi adalah ketersediaan

tenaga khusus yang menangani permasalahan ini, seperti diungkapkan oleh Koordinator Pelayanan Informasi Publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bahwa tersedianya tenaga atau SDM yang khusus menangani bidang Informasi ini memang menjadi hambatan, utamanya di beberapa unit karena memang di kantor yang tidak pernah/jarang melayani permintaan Informasi Publik. Akhirnya mereka terfokus pada tugas rutin mereka sesuai Tupoksinya, sedangkan tugas tambahan sebagai pejabat PPID menjadi sedikit terabaikan. Kendala lain di bidang SDM ini adalah masalah kemampuan dalam bidang IT, kita tahu bahwa basis pelayanan pada instansi ini nantinya diharapkan sudah berbasis IT dengan pelayanan online sedangkan tenaga yang betul-betul mempunyai kemampuan dalam hal ini masih sangat terbatas belum lagi perkembangan IT sekarang ini begitu cepat dan cepat berubah..untuk itu perlu difikirkan untuk ke depan merekrut tenaga-tenaga yang memang mempunyai kualifikasi di bidang IT ini.

- b. Lemahnya Pemahaman akan Tugas dan Fungsi Menyangkut Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasca Berlakuknya UU Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi menyangkut upaya seharusnya setiap unit di lingkungan instansi ini untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik.
- c. Kendala Penyediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Anggaran. Keinginan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan sistem layanan berbasis internet (online) merupakan sebuah terobosan yang berorientasi

pada kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk bisa mendukung semua itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar semua sistem bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penyediaan anggaran dan sarana, memang harus menjadi perhatian agar semua sistem yang dibangun bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan karena pada akhirnya tujuan dari semua itu adalah untuk pelayanan kepada masyarakat agar hak-haknya untuk mendapatkan informasi publik bisa dipenuhi oleh setiap Badan Publik yang memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai kewajiban untuk itu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar Pelayanan Informasi Publik di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah lebih maksimal dalam mengelola pelayanan informasi publik agar kendala yang muncul dapat teratasi. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Menyusun dan menyatakan arah secara tegas melalui pernyataan visi (gambaran masa depan), misi (alasan mengapa layanan ini ada), nilai (prinsip yang dipegang), fokus strategi, dan faktor keberhasilan kritis (mengidentifikasi apa yang penting).
2. Membuat rencana strategis yang akan dicapai di masa yang akan datang. Hal ini akan berguna dalam menentukan fokus atau arah pencapaian tujuan dari rencana jangka pendek yang telah dibuat setiap tahunnya. Dalam pembuatan rencana strategis, Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa

Tengah dapat melakukan analisis SWOT.

3. Membuat format daftar informai sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi serta mensosialisasikan daftar informasi publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kepada publik segera setelah disahkan melalui SK (Surat Keputusan) Pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Tanpa adanya daftar ini, pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak akan berjalan maksimal.
4. Membangun website khusus pelayanan informasi publik. Website ini akan berguna bagi kegiatan operasional sehari-hari, karena informasi mengenai pelayanan informasi publik akan terintegrasi dalam satu saluran komunikasi.
5. Bekerjasama dengan perpustakaan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Informasi yang sifatnya terbuka untuk publik dapat dikelola oleh perpustakaan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan perpustakaan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga meliputi kemas ulang informasi.;
6. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang-Undang tersebut hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
7. Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas

khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih fokus.

8. Terus dilakukan monitoring dan evaluasi baik menyangkut peran PPID maupun implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini agar ke depan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas.